

Perbandingan Pembuatan Kartu Identitas Warga Negara Indonesia dan Singapura

Vira Khairun Nisa¹, Timbul Dompok²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

email: pb231010026@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Identity cards play a crucial role in proving someone's identity in the modern era. This research compares the process of issuing national identity cards in Indonesia and Singapore, focusing on security, efficiency, speed, and reliability. Indonesia, with its large and diverse population, and Singapore, with a smaller population but high population density, demonstrate different approaches to identity card issuance. An analysis is conducted on the strengths and weaknesses of each system, including technological innovation, population coverage, inter-agency cooperation, biometric usage, and improvements in public services. Despite facing challenges such as limited infrastructure, administrative issues, and potential corruption, Indonesia continues to innovate with chip technology and inter-agency collaboration. In Singapore, an efficient identity card issuance system is supported by advanced technology, online services, and a focus on privacy. Nevertheless, challenges related to technology dependence, privacy issues, accessibility, administrative errors, and costs remain concerns. Nonetheless, this research provides valuable insights for the development of public administration systems in other countries.

Keywords: *Identity cards; Indonesia; Singapore*

PENDAHULUAN

Kartu identitas merupakan dokumen resmi yang memainkan peran krusial dalam membuktikan identitas seseorang dalam masyarakat modern. Di era globalisasi saat ini, negara-negara sering kali melakukan pembaruan dalam sistem administratif mereka, termasuk dalam proses pembuatan kartu identitas warga negara. Indonesia dan Singapura, dua negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara, memiliki sistem pembuatan kartu identitas yang telah berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan mendalam antara proses pembuatan kartu identitas warga negara Indonesia dan Singapura. Dalam kaitannya dengan keamanan, efisiensi, kecepatan, dan keandalan proses pembuatan, perbandingan antara dua sistem ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan sistem administrasi publik di negara-negara lain.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam, memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola proses pembuatan kartu identitas bagi warga negaranya. Di sisi lain, Singapura, dengan ukuran populasi yang lebih kecil namun

tingkat kepadatan yang tinggi, menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam penanganan administrasi publik, termasuk pembuatan kartu identitas.

Dengan memperbandingkan proses pembuatan kartu identitas warga negara Indonesia dan Singapura, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan dalam proses administrasi publik, yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data identitas warga negara.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki relevansi yang penting dalam konteks pengembangan sistem administrasi publik di negara-negara lain, serta memberikan kontribusi terhadap literatur tentang administrasi publik dan sistem identitas nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam permasalahan yang ada peneliti tertarik mengambil melalui penelitian yang diberi judul "Perbandingan Pembuatan Kartu Identitas Warga Negara Indonesia dan Singapura".

KAJIAN TEORI

Kartu identitas adalah dokumen resmi yang digunakan untuk membuktikan identitas seseorang (Purba, et al., 2018). Biasanya, kartu identitas mengandung informasi seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan foto pemegang kartu. Kartu identitas dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam suatu negara, dan berfungsi sebagai alat verifikasi identitas yang penting dalam berbagai situasi, seperti pembukaan rekening bank, pendaftaran kegiatan resmi, perjalanan internasional, dan lain sebagainya.

Fungsi kartu identitas meliputi:

a) Verifikasi Identitas

Kartu identitas digunakan untuk memastikan identitas seseorang dalam berbagai transaksi atau interaksi resmi.

b) Akses Layanan Publik

Kartu identitas sering kali diperlukan untuk mengakses layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, atau program sosial.

c) Keamanan

Kartu identitas dapat membantu meningkatkan keamanan dengan membatasi akses terhadap fasilitas atau layanan tertentu hanya kepada individu yang memilikinya.

d) Pemungutan Data Populasi

Pemerintah menggunakan kartu identitas sebagai alat untuk memantau dan mengelola data populasi, seperti sensus atau pemilihan umum.

Di berbagai negara, proses penerbitan dan penggunaan kartu identitas dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan kebijakan yang berlaku. Misalnya, beberapa negara mungkin mewajibkan setiap warga untuk memiliki kartu identitas, sementara negara lain mungkin memiliki sistem alternatif atau tidak mewajibkan penggunaan kartu identitas secara luas.

Peran kartu identitas dalam administrasi publik sangat penting karena kartu identitas adalah salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola populasi, memberikan layanan publik, dan menjaga keamanan (Fahmi, et al., 2013).

Kartu identitas digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang dalam

berbagai transaksi dan interaksi dengan pemerintah maupun entitas swasta (Andi & Dodi, 2019). Dengan adanya kartu identitas, pemerintah dapat memastikan bahwa seseorang adalah warga negara yang sah dan memiliki hak-hak yang terkait dengan status keanggotaannya.

Kartu identitas sering kali menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, transportasi umum, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan kartu identitas, pemerintah dapat memastikan bahwa layanan-layanan ini hanya tersedia bagi mereka yang memenuhi syarat atau kelayakan tertentu (Rusdia, 2019).

Kartu identitas memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengelola data populasi secara efisien. Informasi yang terdapat dalam kartu identitas, seperti alamat, status pernikahan, dan informasi keluarga, dapat digunakan untuk keperluan sensus, perencanaan pembangunan, pemilihan umum, dan program-program sosial (Dewi & Nike, 2018).

Kartu identitas juga memiliki peran dalam menjaga keamanan nasional dengan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan melacak penduduknya. Dalam konteks keamanan, kartu identitas dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah aktivitas ilegal, memerangi terorisme, dan menjaga kedaulatan negara.

Dengan adanya kartu identitas yang terstandarisasi, proses administrasi publik dapat menjadi lebih efisien dan efektif (Aderiska, 2021). Kartu identitas memungkinkan pengurangan birokrasi dalam berbagai proses, seperti pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen resmi, dan penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, kartu identitas bukan hanya sekadar dokumen pengenalan, tetapi juga merupakan instrumen yang penting dalam mendukung fungsi-fungsi administrasi publik yang krusial bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk menyelidiki secara mendalam pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dengan menganalisis dan

mensintesis temuan dari studi-studi yang relevan dan terkini dalam literatur ilmiah.

Sumber data utama untuk penelitian ini adalah artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber literatur terkait yang relevan dengan topik penelitian. Kami menggunakan basis data akademis seperti PubMed, Google Scholar, dan ProQuest untuk mengidentifikasi literatur yang sesuai. Proses seleksi data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi artikel-artikel yang sesuai dengan topik penelitian, mengevaluasi kualitas metodologi penelitian, dan mengekstraksi informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.

Data yang diperoleh dari studi literatur dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Analisis ini melibatkan proses sintesis, perbandingan, dan interpretasi data dari berbagai sumber literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Sistem Pembuatan Kartu Identitas di Indonesia

Sistem pembuatan kartu identitas di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan administratif masyarakat. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk setiap warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun. KTP berfungsi sebagai bukti identitas dan diperlukan dalam berbagai transaksi resmi, seperti pembukaan rekening bank, pendaftaran pendidikan, dan lain sebagainya (Tarifu, 2020).

Proses pembuatan KTP dimulai dengan pendaftaran penduduk di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat (Purba, et al., 2018). Calon pemegang KTP diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan menyertakan dokumen-dokumen pendukung, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan bukti alamat. Setelah pendaftaran, data penduduk diverifikasi dan diproses untuk pembuatan KTP.

Setelah proses pendaftaran selesai dan data diverifikasi, KTP dicetak oleh pihak yang berwenang, yaitu Disdukcapil. Proses pencetakan KTP biasanya dilakukan secara terpusat di pusat cetak KTP yang dilengkapi dengan peralatan dan teknologi cetak yang

canggih. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan teknologi chip pada KTP elektronik (e-KTP) untuk meningkatkan keamanan dan keandalan kartu identitas. Teknologi chip memungkinkan penyimpanan data biometrik dan informasi identitas lainnya secara elektronik dalam KTP.

e-KTP menggunakan teknologi biometrik, seperti sidik jari dan foto wajah, untuk memverifikasi identitas pemegang kartu dengan lebih akurat. Data biometrik ini juga digunakan untuk memerangi pemalsuan dan penyalahgunaan kartu identitas.

Setelah selesai dicetak, KTP diserahkan kepada pemohon atau diproses untuk pengiriman ke alamat yang tertera dalam formulir pendaftaran. Proses pengiriman dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari pengambilan langsung di kantor Disdukcapil hingga pengiriman melalui pos atau kurir.

Meskipun telah mengalami kemajuan dalam hal teknologi dan keamanan, sistem pembuatan KTP di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti tingginya jumlah penduduk, masalah administrasi, dan potensi kecurangan. Oleh karena itu, terus dilakukan upaya-upaya perbaikan dan inovasi dalam sistem pembuatan KTP untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan kepada masyarakat (Yusrizal, et al., 2018).

b) Kelebihan Sistem Pembuatan Kartu Identitas di Indonesia

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sistem pembuatan kartu identitas di Indonesia memiliki beberapa kelebihan yang dapat diidentifikasi. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a) Inovasi Teknologi

Indonesia terus melakukan investasi dalam teknologi untuk meningkatkan keamanan dan keandalan kartu identitas. Penggunaan teknologi chip dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) memungkinkan penyimpanan data biometrik secara aman dan efisien, serta memperkuat perlindungan terhadap pemalsuan. Dengan adanya teknologi chip ini, data biometrik seperti sidik jari dan foto wajah dapat disimpan secara aman di dalam e-KTP. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan identitas pemegang kartu, tetapi juga memperkuat kemampuan verifikasi identitas

oleh pihak yang berwenang. Selain itu, teknologi chip juga memungkinkan integrasi dengan sistem-sistem lainnya, seperti basis data kependudukan nasional, sehingga informasi yang tersimpan dalam e-KTP dapat dengan mudah diverifikasi dan diakses oleh instansi-instansi terkait. Selain itu, teknologi chip juga memungkinkan implementasi fitur keamanan tambahan, seperti enkripsi data dan tanda tangan digital, yang menjadikan e-KTP lebih sulit untuk dipalsukan atau dimanipulasi. Dengan demikian, investasi dalam teknologi chip untuk e-KTP merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan keamanan dan keandalan kartu identitas di Indonesia.

b) Cakupan Populasi

Sistem pembuatan KTP di Indonesia mencakup seluruh populasi warga negara Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil. Meskipun tantangan logistik sering kali ada, upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat memiliki akses ke kartu identitas. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang menasar daerah-daerah terpencil, seperti kampanye pendaftaran massal, mobilisasi petugas pendaftaran ke lokasi-lokasi terpencil, dan penyediaan fasilitas pendaftaran yang mudah diakses. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki KTP serta membantu dalam proses pendaftaran. Dengan demikian, meskipun tantangan geografis dan logistik sering kali menjadi hambatan, upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk yang berada di daerah-daerah terpencil, dapat memiliki akses yang adil dan merata terhadap kartu identitas.

c) Kerjasama Antarinstansi

Kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri, telah memperkuat sistem pembuatan KTP. Kerjasama ini membantu meningkatkan efisiensi dalam proses verifikasi data dan penerbitan KTP. Kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat antara lembaga-lembaga terkait, sehingga meminimalkan kesalahan atau tumpang tindih data. Selain itu, dengan adanya kerjasama ini,

proses verifikasi dan penerbitan KTP dapat dilakukan lebih cepat dan efisien karena setiap instansi dapat memainkan peran mereka dalam proses tersebut tanpa hambatan atau kendala yang berarti. Ini pada gilirannya menghasilkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan memastikan bahwa KTP diterbitkan dengan tepat waktu dan akurat sesuai dengan kebutuhan administratif.

d) Penggunaan Biometrik

Integrasi teknologi biometrik, seperti sidik jari dan foto wajah, dalam e-KTP memperkuat keamanan identitas. Data biometrik yang tersimpan dalam kartu identitas memungkinkan verifikasi identitas yang lebih akurat dan mengurangi risiko penyalahgunaan kartu identitas.

e) Peningkatan Layanan Publik

Sistem pembuatan KTP yang terus ditingkatkan juga berdampak pada peningkatan layanan publik. Proses yang lebih efisien dan akurat dalam pendaftaran dan penerbitan KTP membantu mempercepat akses masyarakat terhadap berbagai layanan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perbankan. Dengan memiliki identitas resmi yang sah dan terverifikasi, individu dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Misalnya, dalam sektor kesehatan, KTP dapat digunakan untuk mendaftar ke program asuransi kesehatan atau mendapatkan pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang terdaftar. Di bidang pendidikan, KTP diperlukan untuk mendaftar di sekolah-sekolah negeri atau swasta dan mengakses program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, KTP juga diperlukan untuk membuka rekening bank, mengajukan pinjaman, atau melakukan transaksi keuangan lainnya di lembaga keuangan yang terpercaya. Dengan demikian, sistem pembuatan KTP yang efisien berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik yang esensial bagi kesejahteraan dan perkembangan mereka.

f) Transparansi dan Akuntabilitas

Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pembuatan KTP juga telah dilakukan. Penyediaan informasi yang lebih terbuka tentang proses pembuatan KTP dan tindak lanjut terhadap

keluhan masyarakat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut (Muhammad, 2020).

Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan kelebihan-kelebihan ini, Indonesia dapat terus memperbaiki dan mengoptimalkan sistem pembuatan kartu identitas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

a) Kelemahan Sistem Pembuatan Kartu Identitas di Indonesia

Meskipun telah mengalami kemajuan, sistem pembuatan kartu identitas di Indonesia masih menghadapi beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki (Supriyanto, et al., 2021). Berikut adalah beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi:

a. Keterbatasan Infrastruktur

Di beberapa daerah, terutama daerah pedesaan atau terpencil, infrastruktur yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam proses pembuatan kartu identitas (Barnesi & Martinus, 2020). Kurangnya aksesibilitas ke kantor pemerintah, keterbatasan jaringan internet, dan masalah transportasi dapat memperlambat proses pendaftaran dan pengambilan kartu identitas. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan infrastruktur dasar, seperti pembangunan kantor pelayanan terpadu yang tersebar di berbagai wilayah, pengembangan jaringan internet di pedesaan, dan penyediaan layanan transportasi publik yang memadai. Selain itu, pendekatan berbasis teknologi juga diperkuat, seperti penggunaan sistem pendaftaran online dan mobile registration units untuk membantu warga di daerah terpencil mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat dalam proses pendaftaran KTP.

b. Masalah Administrasi

Proses administrasi yang rumit dan memakan waktu dalam pendaftaran dan verifikasi data dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan kartu identitas. Masalah-masalah administratif, seperti kesalahan pencatatan data atau kurangnya koordinasi antarinstansi, dapat mengganggu kelancaran proses pembuatan KTP. Untuk mengatasi hal ini, perlu diperkuat koordinasi antarinstansi terkait dan peningkatan kualitas data yang tercatat dalam sistem. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi petugas yang terlibat dalam

proses pendaftaran dan verifikasi juga menjadi penting untuk meminimalkan kesalahan administratif dan meningkatkan efisiensi dalam pembuatan KTP.

c. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan KTP masih merupakan masalah yang serius di beberapa wilayah (Adithia, 2021). Kasus-kasus penyuapan untuk mempercepat proses penerbitan KTP dan penggunaan identitas palsu untuk kepentingan ilegal merupakan contoh dari kelemahan dalam sistem pembuatan kartu identitas. Tindakan korupsi ini merugikan tidak hanya kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga berpotensi membahayakan keamanan nasional dengan memungkinkan akses ilegal ke identitas resmi. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas dan pengawasan ketat dari berbagai pihak terkait untuk memerangi dan mencegah praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang dalam proses pembuatan kartu identitas. Upaya-upaya ini harus didukung oleh reformasi kebijakan dan penegakan hukum yang kuat guna menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari tindakan korupsi dalam administrasi publik.

d. Keterbatasan Layanan di Daerah Terpencil

Masyarakat di daerah terpencil atau terisolasi seringkali menghadapi keterbatasan layanan dalam proses pembuatan KTP. Kurangnya ketersediaan petugas pendaftaran, minimnya informasi tentang prosedur pendaftaran, dan kesulitan dalam pengiriman kartu identitas dapat menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan KTP (Suriyani, 2018).

Dengan mengidentifikasi kelemahan kelemahan ini, pemerintah Indonesia dapat melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dalam sistem pembuatan kartu identitas untuk memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses dengan mudah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat (Supriyanto, et al., 2021).

b) Sistem Pembuatan Kartu Identitas di Singapura

Singapura dikenal karena memiliki sistem administrasi publik yang efisien dan canggih. Demikian juga dengan sistem pembuatan kartu identitasnya. National Registration Identity Card (NRIC) adalah kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura kepada warga negara Singapura. NRIC berfungsi sebagai bukti identitas dan juga mencatat informasi penting seperti nomor identitas unik, nama, tanggal lahir, dan alamat.

Proses pendaftaran untuk mendapatkan NRIC dimulai segera setelah kelahiran atau setelah seseorang mendapatkan kewarganegaraan Singapura. Data pribadi yang diperlukan untuk pendaftaran meliputi informasi dasar seperti nama, tempat dan tanggal lahir, dan kewarganegaraan (Deswantara, 2011).

Setelah proses pendaftaran selesai, NRIC dikeluarkan oleh pihak berwenang, yaitu Badan Pendaftaran Penduduk dan Imigrasi Singapura (Immigration & Checkpoints Authority - ICA). NRIC biasanya diberikan kepada pemohon dalam waktu yang singkat setelah pendaftaran, dan merupakan kartu identitas resmi yang berlaku seumur hidup. Singapura dikenal akan pemanfaatan teknologi canggih dalam sistem administrasinya, termasuk dalam pembuatan kartu identitas. NRIC Singapura menggunakan teknologi yang canggih untuk mencegah pemalsuan, seperti chip elektronik dan fitur keamanan lainnya.

NRIC Singapura dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan yang dirancang untuk melindungi keaslian kartu dan data pemiliknya. Fitur-fitur ini termasuk hologram, gambaran ultraviolet, dan pencetakan yang tahan air. Pemilik NRIC di Singapura diharapkan untuk secara berkala memperbarui data pribadi mereka, seperti alamat tempat tinggal, status perkawinan, dan informasi kontak lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang tercatat dalam NRIC selalu akurat dan terkini.

ICA Singapura menyediakan layanan online untuk memfasilitasi proses pendaftaran dan pembaruan NRIC. Ini memungkinkan warga negara Singapura untuk mengakses layanan administratif tanpa harus datang ke kantor secara langsung, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Sistem

pembuatan kartu identitas di Singapura mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan administratif yang berkualitas tinggi dan efisien kepada warganya. Dengan pemanfaatan teknologi yang canggih dan proses yang terotomatisasi, Singapura mampu menjaga keamanan dan keakuratan data identitas warganya secara efektif.

c) Kelebihan Sistem Pembuatan Kartu Identitas di Singapura

Sistem pembuatan kartu identitas di Singapura memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi salah satu yang terdepan di dunia.

a) Efisiensi dan Kecepatan

Proses pembuatan kartu identitas di Singapura terkenal karena efisiensinya. Pemerintah Singapura telah mengimplementasikan sistem yang terotomatisasi dan terpusat, memungkinkan penerbitan kartu identitas dengan cepat dan tanpa birokrasi yang berlebihan. Sebagian besar pemohon dapat menerima kartu identitas mereka dalam waktu yang singkat setelah pendaftaran.

b) Pemanfaatan Teknologi Canggih

Singapura secara aktif memanfaatkan teknologi canggih dalam sistem administrasinya. Penggunaan teknologi seperti otomatisasi, analisis data, dan sistem informasi terintegrasi membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pembuatan kartu identitas.

c) Pelayanan Online

Pemerintah Singapura menyediakan layanan online yang memungkinkan warga negara untuk melakukan pendaftaran dan pembaruan NRIC secara mudah dan nyaman melalui internet. Ini membantu mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses administratif, serta meningkatkan kenyamanan bagi warga.

Kelebihan-kelebihan ini menjadikan sistem pembuatan kartu identitas di Singapura sebagai salah satu yang terdepan di dunia, memastikan bahwa layanan administratif yang berkualitas tinggi dapat disediakan kepada warga negara Singapura dengan efisien dan aman.

d) Kelemahan Sistem Pembuatan Kartu Identitas di Singapura

Meskipun sistem pembuatan kartu identitas di Singapura telah diakui secara luas karena keunggulannya, namun tetap ada beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi:

a) Ketergantungan pada Teknologi

Ketergantungan pada teknologi canggih dalam pembuatan kartu identitas bisa menjadi titik lemah jika terjadi kegagalan sistem atau serangan siber yang dapat mengancam keamanan data pribadi. Hal ini mengingatkan teknologi tidak luput dari risiko gangguan teknis atau serangan hacker. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memperbarui dan memperkuat sistem keamanan mereka, termasuk melalui pengembangan tindakan pencegahan dan deteksi yang lebih canggih serta pelatihan bagi personel yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan teknologi tersebut. Dengan demikian, potensi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada teknologi canggih dalam pembuatan kartu identitas dapat diminimalkan dan keamanan data pribadi dapat lebih terjamin.

b) Masalah Privasi

Meskipun sistem kartu identitas canggih dapat meningkatkan keamanan data, ada kekhawatiran terkait dengan privasi. Penggunaan teknologi biometrik atau penyimpanan data yang terlalu rinci dapat memicu kekhawatiran tentang penyalahgunaan atau pelanggaran privasi oleh pihak yang tidak berwenang.

c) Keterbatasan Aksesibilitas

Meskipun Singapura terkenal akan infrastrukturnya yang canggih, ada kemungkinan bahwa beberapa segmen masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan atau berpendapatan rendah, mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pembuatan kartu identitas yang terpusat di pusat kota.

d) Kesalahan Administrasi

Meskipun jarang terjadi, kesalahan administrasi seperti kesalahan pencatatan data atau pengiriman kartu identitas ke alamat yang salah masih bisa terjadi dalam sistem

yang terotomatisasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pemohon dan membutuhkan waktu dan upaya tambahan untuk diperbaiki.

e) Biaya dan Penyalahgunaan Finansial

Meskipun proses pendaftaran dan pembaruan NRIC mungkin gratis atau memiliki biaya yang terjangkau bagi sebagian besar warga, masih ada potensi penyalahgunaan atau penipuan terkait dengan biaya yang terkait dengan pembuatan atau pembaruan kartu identitas.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa kelemahan-kelemahan ini mungkin relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan besar yang diberikan oleh sistem pembuatan kartu identitas yang efisien dan aman di Singapura. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi dan memperbaiki masalah ini guna memastikan bahwa layanan pembuatan kartu identitas tetap menjadi yang terbaik bagi warga negara Singapura.

f) Perbandingan Antara Sistem Pembuatan Kartu Identitas Indonesia dan Singapura

Ketika dibandingkan, sistem pembuatan kartu identitas di Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan. Proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Indonesia sering kali memerlukan waktu yang cukup lama dan melibatkan proses administratif yang rumit. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang terbatas dan volume penduduk yang besar dapat memperlambat proses ini. Di sisi lain, sistem pembuatan kartu identitas di Singapura terkenal karena kecepatan dan efisiensinya. Proses yang terotomatisasi dan terpusat memungkinkan warga Singapura untuk menerima National Registration Identity Card (NRIC) mereka dengan cepat setelah pendaftaran.

Meskipun telah diperkenalkan teknologi chip pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk meningkatkan keamanan, masalah pemalsuan dan keamanan data masih menjadi perhatian di Indonesia. Sistem kartu identitas di Singapura, dengan fitur keamanan canggih seperti teknologi chip elektronik, hologram, dan pencetakan tahan air, dianggap lebih unggul dalam hal keamanan. Ini membantu

mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan identitas dengan lebih efektif.

Kualitas layanan pembuatan kartu identitas di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada daerah dan infrastruktur lokal. Di beberapa daerah, layanan mungkin tidak seefisien di pusat-pusat perkotaan. Singapura dikenal akan layanan administratifnya yang berkualitas tinggi dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi canggih dan integrasi dengan layanan publik lainnya menjadikan proses pembuatan NRIC di Singapura lebih lancar dan nyaman bagi warga negara.

Meskipun telah mengadopsi teknologi chip dalam e-KTP, penggunaan teknologi dalam sistem pembuatan kartu identitas di Indonesia mungkin tidak sekomprensif seperti di Singapura. Singapura memanfaatkan teknologi canggih dalam semua aspek pembuatan NRIC, mulai dari proses pendaftaran hingga pencetakan kartu. Penggunaan teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan proses secara keseluruhan.

Dengan perbandingan ini, terlihat bahwa Singapura memiliki keunggulan dalam efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan dalam pembuatan kartu identitas dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia terus melakukan upaya untuk memperbaiki sistemnya guna meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam layanan administratif kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem pembuatan kartu identitas di Indonesia dan Singapura. Singapura dikenal dengan sistem yang efisien, cepat, dan canggih, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan.

Meskipun demikian, Indonesia memiliki beberapa kelebihan, seperti inovasi teknologi dalam e-KTP, cakupan populasi yang luas, kerjasama antarinstansi, penggunaan biometrik, peningkatan layanan publik, dan transparansi serta akuntabilitas. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan

infrastruktur, masalah administrasi, korupsi, keterbatasan layanan di daerah terpencil, dan potensi penyalahgunaan finansial.

Di sisi lain, Singapura memiliki keunggulan dalam efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan. Faktor-faktor seperti efisiensi proses, pemanfaatan teknologi canggih, layanan online, dan penggunaan fitur keamanan yang canggih membuat sistemnya menjadi salah satu yang terdepan di dunia. Meskipun demikian, Singapura juga tidak terlepas dari beberapa kelemahan, seperti ketergantungan pada teknologi, masalah privasi, keterbatasan aksesibilitas, kesalahan administrasi, dan potensi biaya serta penyalahgunaan finansial.

Dari perbandingan antara kedua negara, terlihat bahwa Singapura memiliki keunggulan dalam efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan dalam pembuatan kartu identitas dibandingkan dengan Indonesia. Namun, Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki sistemnya guna meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan administratif kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aderiska, M., 2021. Analisis Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kantor Camat Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun (Pendekatan Model Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN"). *Other thesis, Universitas Islam Riau.*
- Adithia, A., 2021. New Public Service Dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. *Other thesis, Universitas Islam Riau.*
- Andi, M. M. & Dodi, F., 2019. PENGARUH PELAYANAN DAN LOYALITAS PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM MENGURUS KARTU TANDA PENDUDUK DI KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR DI JAKARTA UTARA. *UTA 45, 5(2).*
- Barnesi, D. & Martinus, S., 2020. IMPLEMENTASI STRATEGI PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KABUPATEN MAMASA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi.*

- Deswantara, I., 2011. Pelaksanaan KTP Siak Dalam Mendukung Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Batam. *Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.*
- Dewi, S. O. & Nike, M. F., 2018. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG. *JMAN jurnal mahasiswa Administrasi negara.*
- Fahmi, R., Siti, R. & Siswidiyanto, 2013. ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (Studi tentang Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Depok). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), pp. 981-990 .
- Muhammad, I., 2020. ANALISIS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR. *Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.*
- Novrilla, A., 2016. KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU). *JOM FISIP*, 3(2).
- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I. & Suharyanto, A., 2018. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *PERSPEKTIF*, 2(2), p. 77–83.
- Rusdia, U., 2019. ANALISIS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), p. 104–113.
- Supriyanto, D. F., Prabowo, S., Widodo, A. S. & Eldo, D. H. A. P., 2021. Analisis Kinerja Pelayanan Publik di Masa Pandemi (Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Kabupaten Karawang). *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), p. 40–49.
- Suriyani, E., 2018. EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DI KANTOR KECAMATAN BINTANG ARA KABUPATEN TABALONG. *PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 1(2), p. 463–474.
- Tarifu, L., 2020. IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*, pp. 233 -246.
- Yusrizal, Meyzi, H. & Tua, H., 2018. KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1), pp. 96-104.